

ISLAM DALAM GORESAN PENA BUDAYA

Buku ini ditulis oleh beberapa dosen muda dari latar belakang budaya santri tradisional. Buku dengan banyak kontributor semacam ini biasa disebut bunga rampai. Anda bisa membaca buku sejenis ini dari mana saja, sesuai keinginan Anda. Sebab, masing-masing bab di buku ini tidak saling berkaitan satu sama lain.

Tema yang diangkat buku ini pun sangat beragam. Meskipun demikian, kesemuanya dapat dimasukkan dalam kategori besar “kajian keislaman dan keindonesiaan”. Misalnya, Syamsul Arifin, dengan tulisan berjudul “Budi Utomo dan Kebangkitan Nasional”, menyoroti sejarah lahirnya dan perkembangan organisasi pertama di Indonesia dari tangan para pemuda terpelajar. Perannya bukan hanya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, melainkan juga dalam bidang politik. Akibat gerakan BU, lahir banyak gerakan yang berujung pada usaha merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah.

Masih banyak pembahasan menarik di dalam buku ini tentang Islam dan Indonesia. Lima tulisan berkenaan dengan sejarah Islam, dua tulisan tentang kehidupan pedesaan, satu tulisan tentang ejaan bahasa Indonesia dengan pendekatan sejarah, satu tulisan tentang kisah dalam Alquran, dan dua tulisan membahas profesionalisme pustakawan.

Selamat membaca!



RELIGION & SOCIAL SCIENCES

ISBN: 978-602-391-840-9



9 786023 918409



Machasin, dkk.



ISLAM DALAM GORESAN PENA BUDAYA



ISLAM DALAM GORESAN PENA BUDAYA

Machasin, dkk.

Machasin, dkk.

ISLAM

DALAM GORESAN PENA BUDAYA



ISLAM DALAM GORESAN PENA BUDAYA

Penulis: Machasin, dkk.

Editor: Syifa'un Nafsiyah, Thoriq Tri Prabowo, Sujadi, dan Ening Herniti

Tata Sampul: Ahmad

Tata Isi: Aira

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, November 2019

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perhutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Bekerja sama dengan

FORUM SILATURAHMI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta Indonesia

Telp. +62274513949

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Machasin, dkk.

Islam dalam Goresan Pena Budaya/Machasin, dkk.; editor, Syifa'un Nafsiyah, Thoriq Tri Prabowo, Sujadi, dan Ening Herniti—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2019

246 hlmn; 16 x 24 cm

ISBN 978-602-391-840-9

1. Religion & Social Sciences

II. Syifa'un Nafsiyah, Thoriq Tri Prabowo, Sujadi, dan Ening Herniti

I. Judul

Daftar Isi

Kata Pengantar 3

Daftar Isi 7

ULAMA PEREMPUAN DALAM SEJARAH ISLAM

MACHASIN 9

INDONESIAN MUSLIMS IN GERMANY: FROM YMAE TO IWKZE.V.

SUJADI 31

BUDI UTOMO DAN KEBANGKITAN NASIONAL

SYAMSUL ARIFIN 45

SYAIKH AHMAD KHATIB AL MINANGKABAWI DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI MINANGKABAU

ABAD XIX-XX

ZUHROTUL LATIFAH 71

DEMOKRASI DESA: ANTARA KUMIS DAN ANALISIS

BADRUN 99

MODIN: PELAYAN UMAT DAN PENJAGA TRADISI (MENYELAMI SEJARAH HIDUP MBAH AHMAD

MUSNADI 1912-1997)

IMAM MUHSIN 111

KOMUNITAS DIFABEL DALAM SEJARAH DAN HISTORIOGRAFI AWAL ISLAM

NURUL HAK 141

KEPATUHAN MALAIKAT DAN PERSETERUAN ADAM DAN IBLIS (KISAH DALAM Q.S. AL-A'RAF: 11-25 DAN Q.S. TAHA: 115-123)

MOH. HABIB  161

SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA (DARI MASA PEMERINTAHAN BELANDA HINGGA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO)

ENING HERNITI  179

KOLABORASI PUSTAKAWAN ANTAR DAN LINTAS PROFESI: SEBUAH OPINI

THORIQ TRI PRABOWO  207

INTERNALISASI NILAI-NILAI PROFETIK DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS INKLUSIF DI PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ANIS MASRURI  221

SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA (DARI MASA PEMERINTAHAN BELANDA HINGGA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO)

ENING HERNITI

Dosen Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal pembaruan ejaan dalam bahasa Melayu (bahasa Indonesia). Pembaharuan ejaan tersebut sebagai imbas gerakan pembaruan ejaan yang telah dilakukan lebih dari 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19. Pembaruan ejaan (*spelling reform*) adalah tindakan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam suatu bahasa. Pembaruan ejaan sangat penting karena ejaan merupakan salah satu kaidah bahasa, terutama dalam bahasa tulis, yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Keteraturan tersebut akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna.

Pembaharuan ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami tujuh kali perubahan seiring perubahan kebijakan pemerintah, yakni pada masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Pembaharuan ejaan juga dilakukan karena kebutuhan pemakai bahasa Indonesia. Perubahan ini dilandasi untuk memperkokoh jati diri bahasa Indonesia.

Dilihat dari kesejarahannya, bahasa Indonesia merupakan varian dan pengembangan dari bahasa Melayu yang telah dipakai sejak abad ke-7 tidak hanya di Nusantara, tetapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yakni menjadi bahasa persatuan pada saat deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan diakui secara yuridis pada 18 Agustus 1945 melalui UUD 1945 (Samsuri, 1985:14). Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu terpecah menjadi dua. Indonesia di bawah Belanda mengadopsi Ejaan van Ophuijsen pada tahun 1901, sedangkan Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson pada tahun 1904.

Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya Ejaan van Ophuijsen. Ejaan ini dengan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang rancang oleh Charles A. van Ophuijsen. Dalam pelaksanaannya, Ch. van Ophuijsen mendapat bantuan dari Engku Nawawi dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim. Dengan adanya perubahan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu yang pada awalnya menggunakan aksara Arab Melayu (abjad Jawi) berubah menjadi aksara Latin.

Aksara atau abjad Jawi adalah salah satu dari abjad pertama yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu, dan digunakan sejak zaman Kerajaan Pasai, sampai zaman Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, dan juga Kesultanan Aceh serta Kesultanan Patani pada abad ke-17. Bukti dari penggunaan ini ditemukan di Batu Bersurat Terengganu, bertarikh 1303 Masehi (702 H). Penggunaan alfabet Romawi pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19. Abjad Jawi merupakan tulisan resmi dari negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada zaman kolonialisme Britania.

Sebelum kemerdekaan, ejaan yang diberlakukan adalah Ejaan van Ophuijsen yang diresmikan pada 190. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami enam kali perubahan ejaan, Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi (1947–1956), Ejaan Pembaharuan (1956–1961), Ejaan Melindo (1961–1967), Ejaan Baru/Lembaga Bahasa dan Kasusastraan (LBK) (1967–1972), Ejaan yang Disempurnakan (EYD) (1972–2015), dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) (2015 sampai sekarang).

Penelitian yang terkait dengan perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia masih sangat minim. Hal ini terbukti dari hasil penelusuran penulis bahwa baru ada satu penelitian, yakni penelitian Karyati yang berjudul “Antara EYD dan PUEBI: Suatu Analisis Komparatif” (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya perubahan dari EYD ke PUEBI. Perubahannya meliputi penambahan, penghilangan, pengubahan, dan pemindahan klausul. Tulisannya fokus pada perubahan ejaan dari EYD ke EBI, sedangkan tulisan ini berupaya memaparkan perubahan-perubahan ejaan dari Ejaan van Ophuijsen (1901) sampai dengan Ejaan Bahasa Indonesia (2015).

Tulisan ini menjabarkan persoalan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yakni dari sebelum menjadi bahasa Indonesia sampai dengan sekarang. Tentu saja perkembangan ejaan tersebut karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pada saat menjabat.

B. EJAAN

Ejaan pada hakikatnya konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacaannya (Chaer, 2002:36).

Putrayasa (2014: 21) memaparkan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang dipisahkan dan digabungkan dalam suatu bahasa. Dalam KBBI, ejaan diartikan sebagai sejumlah kaidah tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, dan tanda baca sebagai sarannya (KBBI Daring, 2016). Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca.

Ejaan berbeda dengan mengeja. Mengeja merupakan kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan mengatur cara penulisan bahasa secara keseluruhan. Aturan dalam ejaan ini harus dipatuhi agar terdapat keteraturan dan keseragaman bentuk, khususnya dalam bahasa tulis.

1. Pengertian Ejaan

Ejaan (*spelling*) adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Dapat juga dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antarlambang-lambang itu (pemisahannya, penggabungannya) dalam suatu bahasa. Ejaan memiliki tiga aspek, yakni aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan-satuan morfemis, sedangkan aspek sintaksis menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca atau punctuation (Kridalaksana, 1993:48; Herniti, 2005:6). Dalam KBBI Daring (2016) disebutkan bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca. Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca.

Dari beberapa definisi ejaan sebagaimana diungkapkan oleh pakar di atas, dapat dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah yang mengatur pelambangan bunyi ujar, tata cara penulisan kata, penulisan kalimat, dan tanda bacanya.

2. Fungsi Ejaan

Ejaan berfungsi sebagai (1) landasan pembakuan tata bahasa, (2) landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, (3) alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan (4) membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis (Winarto, 2016: 251).

C. PRINSIP DASAR PERUBAHAN EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA

Perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip dasar yang menjadi patokannya, yakni prinsip kecermatan, prinsip kehematan, prinsip keluwesan, dan prinsip kepraktisan (Kushartanti, 2007:84; Wahyudi, 2017: 46–48). Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Prinsip Kecermatan

Sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Jika sebuah tanda digunakan untuk melambangkan satu fonem, tanda tersebut harus selalu dipakai seterusnya untuk menandai fonem itu. Misalnya, tanda “n” untuk menandai fonem /n/, maka tidak boleh diubah dengan tanda “c” karena akan membingungkan pemakai bahasa.

2. Prinsip Kehematan (Efisiensi)

Pada hakikatnya, sebuah bahasa mempunyai prinsip kehematan, yaitu satu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Misalnya, dalam Ejaan van Ophuijsen menggunakan vokal *oe* diubah menjadi vokal *u* dalam sistem Ejaan Soewandi.

3. Prinsip Keluwesan

Keluwesannya berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa perubahan ejaan terjadi pada 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19. Ini artinya bahwa perubahan ejaan sangat penting dilakukan agar tidak ketinggalan zaman.

4. Prinsip Kepraktisan

Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda diakritik. Tanda diakritik adalah tanda tambahan pada huruf yang

sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu, misalnya tanda [´] pada é. Tanda diakritik biasanya dipakai oleh bahasa yang bertonal, seperti bahasa Mandarin, Jerman, Ceko, Vietnam, Islandia, atau Spanyol. Tanda diakritis tetap dipertahankan di negara-negara tersebut karena adanya perbedaan makna yang dikandung. Sementara itu, tanda diakritik dalam ejaan bahasa Indonesia kurang signifikan untuk membedakan makna.

D. PERUBAHAN EJAAN

Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatarbelakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara tulis maupun tulisan, menjadi semakin luas. Di samping itu, perubahan ejaan bahasa Indonesia diperlukan karena untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga menjadi alasan dilakukannya perubahan (Karyati, 2016: 175).

Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami tujuh kali perubahan, yaitu Ejaan van Ophuijsen (1901–1947), Ejaan Repoeblik/Ejaan Soewandi (1947–1956), Ejaan Pembaharuan (1956–1961), Ejaan Melindo (1961–1967), Ejaan Baru/Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1967–1972), Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (1972–2015), dan (2015–sekarang). Dari ketujuh perubahan tersebut, terdapat tiga sistem ejaan yang tidak sempat diberlakukan, yaitu Ejaan pembaharuan, Ejaan Melindo, dan Ejaan LBK. Perubahan-perubahan sistem ejaan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Ejaan van Ophuijsen (1901–1947)

Aksara Arab Melayu dipakai secara umum di daerah Melayu dan daerah-daerah yang telah menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi, karena terjadi kontak budaya dengan dunia Barat, sebagai akibat dari kedatangan orang Barat dalam menjajah di Tanah Melayu itu, di sekolah-sekolah Melayu telah digunakan aksara Latin secara tidak terpimpin. Melihat hal tersebut, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mulai menyadari bahasa Melayu dapat dipakai oleh

pegawai pribumi untuk keperluan administrasi karena pegawai pribumi lemah dalam penguasaan bahasa Belanda. Sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang distandardisasikan adalah bahasa Melayu ragam tinggi, yakni bahasa Melayu yang digunakan untuk komunikasi formal. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung oleh penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah “embrio” bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau-Johor.

Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia (sebagai Hindia-Belanda) mengadopsi Ejaan van Ophuijsen dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu (kelak menjadi bagian dari Malaysia) di bawah Inggris mengadopsi Ejaan Wilkinson. Ejaan van Ophuijsen diawali dari penyusunan *Kitab Logat Melayu* (dimulai tahun 1896) yang diprakarsai oleh Charles A. van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Soetan Ma'moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim. Ejaan tersebut dikenal dengan nama *Ejaan van Ophuijsen* atau *Ejaan Balai Pustaka*. Dinamakan Ejaan van Ophuijsen karena yang membuat adalah Charles van Ophuijsen. Ejaan tersebut banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan baru pada tahun 1926 mendapat bentuk yang tetap. Ejaan van Ophuijsen digunakan selama 46 tahun. Ejaan ini baru diganti setelah dua tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Charles Adriaan van Ophuijsen yang lahir di Solok, Sumatera Barat, pada tahun 1856 dan meninggal pada tanggal 19 Februari 1917 di Leiden adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ia gemar mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda dan seorang Kepala Sekolah pertama SMA Negeri 2 Bukittinggi. Ia juga pernah menjadi inspektur sekolah di maktab perguruan Bukittinggi, Sumatera Barat. Kemudian ia menjadi guru besar pada bidang bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Charles van Ophuijsen pada tahun 1879 menerbitkan buku berjudul *Kijkjes in Het Huiselijk Leven Volkdicht* (Pengamatan Selintas Kehidupan

Kekeluargaan Suku Batak) dan *Maleische Spraakkunst* (Tata Bahasa Melayu). Pada tahun 1904 Pemerintah kolonial kemudian mengangkatnya menjadi guru besar ilmu bahasa dan kesusasteraan Melayu di Universitas Leiden. Charles van Ophuijsen cukup produktif menulis. Hal ini terbukti setelah menerbitkan *Kitab Logat Melajoe*, pada tahun 1910 ia menerbitkan *Maleische Spraakkunst*. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul *Tata Bahasa Melayu* dan menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia.

Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya *Commissie Voor de Inlansche School en Volkslectuur* (Komisi Bacaan Rakyat yang disingkat KBR atau Taman Bacaan Rakyat) pada 14 September 1908. Pada 17 September 1917 lembaga ini menjadi Balai Poestaka (Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2004:116). Balai Pustaka adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara yang menerbitkan kira-kira 350 judul buku per tahun yang meliputi kamus, buku referensi, keterampilan, sastra, sosial, politik, agama, ekonomi, dan penyuluhan. Balai Pustaka menerbitkan beberapa novel, seperti novel *Layar Terkembang*, *Siti Nurbaya*, dan *Salah Asuhan*. Novel-novel tersebut sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada 16 Juni 1927, Jahja Datoek Kajo berpidato menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad (Dewan Rakyat). Inilah kali pertama bahasa Indonesia digunakan pada forum resmi. Selanjutnya pada kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan tercantum dalam deklarasinya. Majalah sastra *Poedjangga Baroe* pertama kali diterbitkan di Jakarta pada 1933 dan didirikan oleh para sastrawan seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Armijn Pane, yang sekarang dikenal sebagai angkatan Pujangga Baru. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara berdasarkan pasal 36 UUD 1945. Berikut beberapa sistem kaidah Ejaan van Ophuijsen.

Tabel 1. Ejaan van Ophuijsen

Huruf y	Ditulis j
Saying	Sajang
Saya	Saja
Huruf u	Ditulis oe
Umur	oemoer
sempurna	sempoerna
Huruf j	Ditulis dj
Jangan	djangan
Jarum	djaroem
Huruf c	Ditulis tj
Cara	Tjara
Cucu	tjoetjoe
Huruf kh	Ditulis ch
Ikhlās	ichlās
Ikhtiar	ichtiar
Huruf k pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas (')	
Maklum	ma'loem
Rakyat	ra'yat

Ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, selanjutnya oleh de Houtman, Casper Wiltens, Sebastianus Dancaert, dan Joannes Roman. Setelah tiga abad kemudian ejaan ini baru mendapat perhatian dengan ditetapkannya Ejaan van Ophuijsen pada tahun 1901.

Kelemahan Ejaan van Ophuijsen adalah (1) adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia tidak menimbulkan kesulitan apapun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia; (2) pemakai bahasa cenderung menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dekat dengan ejaan asli kata asalnya; (3) dalam pemungutan kata asing sukar dihindari adanya gugus tugas konsonan, misalnya, kata *instruktur* dipungut menjadi *in-se-te-ruk-tur*, dan (4) penggunaan tanda diakritik seperti koma ain, koma wasla, dan tanda trema, misalnya, pada kata *so'al*, *ta'*, *pa'* dan

sebagainya. Tanda tersebut digunakan ketika mengindonesiakan kosakata dari bahasa Arab.

2. Ejaan Repoeblik atau Ejaan Soewandi (1947–1956)

Keinginan untuk menyempurnakan Ejaan van Ophuijsen dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I, tahun 1938 di Solo. Hasil Kongres menyebutkan bahwa Ejaan van Ophuijsen untuk sementara waktu masih dapat digunakan, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perlu dipikirkan perubahannya (Muslich, 2010:160). Sembilan tahun kemudian, harapan Kongres Bahasa Indonesia tersebut baru terwujud, yakni dengan adanya Putusan Menteri Pengadjaran Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan ejaan baru tersebut tertuang dalam surat keputusan dengan No. 264/Bhg. A/47 yang berisi perubahan ejaan bahasa Indonesia agar lebih sederhana. Ejaan baru ini dikenal dengan nama Ejaan Soewandi yang diresmikan pada 19 Maret 1947. Berikut adalah perubahan dalam Ejaan Soewandi.

Tabel 2. Ejaan Soewandi

Pasal	Edjaan van Ophuijsen	Edjaan Soewandi	Keterangan
1	a	A	ha, an, nah, Ahmad, hawa, naskah
2	i	ai	hai, air, kail, pakai, pakian, mulai disukai, mengenai Dalam kata-kata mulai, disukai, mengenai (mula, suka, kena, dengan achiran i) tak oesah dinjatakan titik doea diatas hoeroef i
3	au	au	kau, engkau, tembakau, gurau, lampau. Berhoeboeng dengan pasal 19 au djoega akan dipakai oentoek menggantikan aoe, misalnja, kaum, laut, saur, pauh, amu, bau (titik dua di atas u ta' dipakai, seperti pada i djoega; lihat pasal 2)
4	B	B	batoe, baboe, sebab, nasib, lembab
5	D	D	di, dik, dari, ahad, tekad, Ahmad

Islam dalam Goresan Pena Budaya

6	Dj	dj	djoega, hoedjan, djandji
7	E	E	emas, soember, sate, tauge, heran. Tanda-tanda diatas e dalam praktik (soerat-menjoerat, tik dan tjetak) memang soedah banyak dihapoeskan.
8	G	G	gelang, gampang, balig
9	H	H	ha, ah, tahoen, tahan
10	I	I	ia, ilmu, kail, hasil
11	J	J	ja, saja, jakin, sajang
12	K	K	kami, anak, soekar
13	L	L	lama, hal, laloe
14	M	m	moe, kamoe, mau, mandi, kolam
15	N	n	tani, nikmat, nenas, teman
16	Ng	ng	telinga, loebang, lengang
17	Nj	nj	njaman, anaknja, mengengjam
18	O	o	oleh, bohong
19	Oe	u	guru, mau, laut (lihat pasal 3)
20	P	p	loepa, asap, pasir
21	R	r	baroe, rasa, pasar
22	S	s	bisa, soedah, basah, balas
23	T	t	satoe, toean, patah, koeat
24	Tj	tj	tjerita, tjertja, tjemburu, tjukur. Katjang
25	W	w	sewa, wakil, kawan
26	Boenji hamzah selaloe ditulis dengan <i>k</i> pada achir soekoe, misalnja, tak, rakjat, tidak, makna		
27	Oelangan boleh ditoelis dengan angka doea (2), tetapi haroes diperhatikan bagaimana jang dioelang itoe, misalnja boekoe-boekoe, sekali-sekali, sekali-kali, mudah-mudahan, berhoeboeng-hoeboengan, perlahan-lahan, loekisan-loekisan, loekis-loekisan		
28	Kata-kata baroe Bahasa Indonesia tidak oesah mendapat pepet, misalnja: praktik (boekan peraktek), administrasi (boekan administerasi), gledek (boekan geledek), stang (boekan setang). Kata-kata lain jang e pepetnja dihilangkan, ditetapkan dalam kamoos.		

Beberapa perubahan penting dalam Ejaan Soewandi adalah preposisi *di* pada *diatas* tidak dipisahkan. Huruf *oe* diganti menjadi *u*. Misalnya, kata *toetoep* menjadi *tutup*. Bunyi sentak diganti dengan huruf *k*. Misalnya, *ra'yat* menjadi *rakyat*. Kata ulang boleh

ditulis dengan angka dua dengan pengulangan pada kata dasarnya, isalnya, *bermain-main* menjadi *ber-main*². Tanda trema dihilangkan. Contohnya, kata *taät* menjadi *taat*. Huruf *e* tidak dibedakan sehingga tidak perlu adanya garis pada bagian atas huruf. Contohnya, kata *beras*, *sejuk*, *bebas*, dan *merah*. Kosakata yang dalam bahasa sumbernya tidak memakai pepet, maka dalam kosakata bahasa Indonesia juga tidak memakai pepet. Contohnya, *sastera* menjadi *sastra*.

3. Ejaan Pembaharuan (1956–1961)

Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini diprakarsai oleh Menteri Moehammad Yamin. Kongres ini membicarakan perubahan sistem ejaan. Beberapa keputusan Kongres adalah (1) ejaan menggambarkan satu fonem dengan satu huruf, (2) ejaan ditetapkan oleh badan yang kompeten, dan (3) ejaan tersebut hendaknya praktis dan ilmiah. Oleh karena itu, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan pada 19 Juli 1956 bernomor 44876/S tentang pembentukan panitia perumus ejaan baru. Panitia ini diketuai oleh Priyono-Katoppo. Setelah bekerja selama setahun, Badan yang dibentuk oleh Menteri berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Patokan-patokan tersebut terumus dalam Ejaan Pembaharuan.

Ejaan Pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. Ejaan Pembaharuan membuat pedoman satu fonem dengan satu huruf. Misalnya, kata *menyanyi* dalam ejaan Soewandi ditulis *menjanji* menjadi *meñañi* dalam ejaan Pembaharuan. Selain itu, berdifong *ai*, *au*, dan *oi* diucapkan menjadi *ay*, *aw*, dan *oy*. Misalnya, *kerbau* menjadi *kerbaw*, *sungai* menjadi *sungay* dan *koboi* menjadi *koboy*. Namun sayangnya, ejaan ini tidak jadi diresmikan sehingga belum pernah diberlakukan. Perubahan ejaan itu tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Ejaan Pembaharuan

No.	Gabungan konsonan	Menjadi
1.	dj	j
2.	tj	ts
3.	ng	ŋ
4.	nj	ñ
5.	sj	š

Pada tabel di atas terlihat penyederhanaan ejaan, yakni huruf yang berupa gabungan konsonan disederhanakan menjadi satu huruf tunggal. Namun, sistem Ejaan Pembaharuan memiliki kelemahan, yakni sulitnya menulis huruf *ŋ*, *ñ*, dan *š* bila menulis menggunakan mesin ketik karena pada mesin ketik tidak ada tuts huruf *ŋ*, *ñ*, dan *š*. Oleh karena itu, sistem ejaan tersebut sangat menyulitkan bagi penggunanya.

4. Ejaan Melindo (1961–1967)

Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam Pengumuman Bersama Edjaan Bahasa Melaju-Indonesia (Melindo) sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959.

Pengupayaan perubahan ini karena pada akhir tahun 1950-an para pemakai ejaan Ejaan Republik mulai merasakan kelemahan ejaan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya kosakata yang menyulitkan dalam penulisannya, yakni adanya satu fonem yang dilambangkan dengan dua huruf, misalnya, *dj*, *tj*, *sj*, *ng*, dan *ch*. Oleh karena itu, agar tidak menyulitkan dalam penulisannya, para pakar bahasa menghendaki satu lambang untuk satu bunyi. Di samping karena faktor internal kelemahan sistem ejaan Republik, juga karena adanya amanah dari hasil Kongres Bahasa Indonesia II di Medan (1954). Perubahan yang terjadi antara lain sebagai berikut.

Tabel 4. Melindo

Ejaan Indonesia (sebelum 1972)	Ejaan Malaysia (sebelum 1972)	Sejak Tahun 1972
tj	ch	c
dj	j	j
ch	kh	kh
nj	ny	ny
sj	sh	sy
j	y	y
oe*	u	u

Pembaharuan ejaan tersebut menghasilkan satu fonem dilambangkan dengan satu huruf. Misalnya, huruf *dj* diganti menjadi *j*, huruf *tj* diganti menjadi *c*, huruf *ng* menjadi *ŋ*, dan huruf *nj* menjadi konsep bersama itu memperlihatkan bahwa satu bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf. Salah satu lambang itu adalah huruf *j* sebagai pengganti *dj*, huruf *c* sebagai pengganti huruf *tj*, huruf *ŋ* sebagai pengganti *ng*, dan huruf *ŋ̣*. Berikut adalah pemakaiannya.

Tabel 5. Perubahan Ejaan Soewandi menjadi Ejaan Melindo

No.	Ejaan Soewandi	Ejaan Melindo
1.	Sedjadjar	Sejajar
2.	Mentjutji	Mencuci
3.	menganga	menṅaṅa
4.	Berjanji	berṅaṅji

Rencana peresmian ejaan bersama pada 1962 tersebut gagal karena terdapat beberapa kesulitan teknis penulisannya dan adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.

5. Ejaan Baru/Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) (1967-1972)

Pemerintah terus berupaya mengadakan pembaharuan ejaan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Lembaga Bahasa dan

Kesusastraan (sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK). Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh panitia Ejaan Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari panitia Ejaan LBK, juga dari panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama Ejaan Baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 19 September 1967 No.062/67. Menteri P dan K saat itu bernama Sarino Mangunpranoto.

Perubahan yang terdapat dalam Ejaan Baru (Ejaan LBK) adalah huruf *tj* diganti *c*, *j* diganti *y*, *nj* diganti *ny*, *sj* menjadi *sy*, dan *ch* menjadi *kh*. Huruf asing seperti *z*, *y*, dan *f* disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemakaian yang sangat produktif. Huruf *e* tidak dibedakan pepet atau bukan, alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf *e* yang menimbulkan salah pengertian. Pada intinya, hampir tidak ada perbedaan berarti di antara ejaan LBK dan EYD, kecuali pada rincian kaidah-kaidah saja. Namun, ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak.

6. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (1972-2015)

Ejaan Soewandi berlaku sampai tahun 1972 yang kemudian digantikan oleh Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada masa menteri Mashuri Saleh. Pada 23 Mei Menteri Pelajaran Malaysia, Tun Hussein Onn, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri Saleh, menandatangani pernyataan bersama tentang Ejaan Baru dan Ejaan yang Disempurnakan. Sebagai menteri, Mashuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dari tulisan *Djl. Tjilatjap* menjadi *Jl. Cilacap*.

Pada tanggal 16 Agustus 1972, sistem ejaan Latin dan bahasa Indonesia mulai berlaku berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1972. Ejaan baru bersama di Malaysia dikenal dengan nama Ejaan Rumi Bersama (ERB). Sementara itu, di Indonesia dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). EYD resmi berlaku pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan pidato kenegaraan ketika memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27. EYD ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972. ⇒

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 Nomor 0196/U/1975 memberlakukan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” dan “Pedoman Umum Pembentukan Istilah”. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) mengalami perubahan, yakni EYD Edisi I (1972–1987), EYD Edisi II (1987–2009), dan EYD Edisi III (2009–2015). Hal ini tampak pada paparan berikut.

a. EYD Edisi I (1972–1987)

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau yang lebih akrab disebut Ejaan yang Disempurnakan (EYD) adalah penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya yang merupakan hasil kerja dari panitia ejaan bahasa Indonesia yang dibentuk oleh LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan) pada 1966. Ejaan ini diresmikan dalam pidato kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-27, 17 Agustus 1972. Selanjutnya dikukuhkan dalam Surat Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.

1) Perubahan huruf

Ada perubahan huruf dari Soewandi ke EYD. Hal ini tampak pada tabel berikut.

Tabel 6. Perubahan Ejaan Soewandi menjadi EYD

Ejaan Soewandi	EYD
dj ⇒ djadjan	j ⇒ jajan
j ⇒ sajang	y ⇒ saying
nj ⇒ monjet	ny ⇒ monyet
sj* ⇒ masjarakat	sy ⇒ masyarakat
tj ⇒ tjara	c ⇒ cara
ch* ⇒ achir	kh ⇒ akhir
y ⇒ panitya	i ⇒ panitia

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kedua gabungan huruf *sj* dan *ch* belum terdapat pada ejaan sebelum EYD. EYD juga meresmikan huruf *f* (*fasih*), *v* (*universitas*), *z* (*zakat*), *q* (*Quran*), dan *x* (*xenon*). Ejaan van Ophuijsen dan Ejaan Soewandi hanya menerapkan satu sistem ejaan, sedangkan EYD menggunakan dua sistem ejaan, yakni (1) ejaan fonemik sebagai basis EYD dan (2) ejaan etimologi. Dengan perkataan lain, EYD adalah sistem dwitunggal ejaan yang merupakan hasil pembakuan dalam bidang ejaan karena bahasa Indonesia berstatus bahasa negara atau kebangsaan.

2) Penyerapan Huruf

Huruf yang diserap adalah *f*, *v*, *z*, *q*, dan *x*. Misalnya, pemakaian huruf *f* dalam kata *maaf* dan *fakir*. Huruf *v* dipakai dalam kata *universitas* dan *valuta*. Huruf *z* dipakai dalam kata *lezat* dan *zeni*. Huruf *q* dan *x* dipakai dalam ilmu eksakta, misalnya, pemakaian huruf *q* dalam rumus $a:b=p:q$. Pemakaian huruf *x* dalam istilah *Sinar-X*. Dengan adanya perubahan huruf dan penyerapan huruf, maka huruf dalam bahasa Indonesia berjumlah 26, yakni *a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, dan z*. Huruf-huruf tersebut dibagi menjadi dua, yakni huruf vokal dan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat lima huruf vokal, yaitu huruf vokal *a, i, u, e, dan o*. Huruf konsonan

terdiri atas huruf *b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y*, dan *z*.

3) Penulisan Awalan

Penulisan awalan *di-* dirangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya, kata *diminum* dan *dilawan*. Sementara itu, penulisan *di* sebagai kata depan dipisahkan dengan kata yang mengikutinya, misalnya, *di hati, di Yogyakarta, di desa, dan di kampus*.

EYD menyempurnakan kaidah ejaan, yakni tentang nama dan penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca.

b. EYD Edisi II (1987–2009)

Pada tanggal 9 September 1987, Menteri Fuad Hasan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 054a/U/1987 tentang penyempurnaan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan”. Keputusan ini merupakan penyempurnaan terhadap EYD edisi I yang diresmikan tahun 1972 (Depdiknas, 2000).

Upaya penyempurnaan tersebut atas usulan dari Kepala Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Desember 1986 No. 5965/F8/UI.7/86. Pertimbangan perubahannya atas dasar a) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 No. 0196/U/1975 tentang berlakunya “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” dan “Pedoman Umum Pembentukan Istilah”, b) bahasa senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat, dan c) perlu penyempurnaan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” ((Depdiknas, 2000).

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi kedua tersebut dicermatkan pada rapat kerja ke-30 Panitia Kerja Sama Kebahasaan di Tugu pada tanggal 16–20 Desember 1990 dan diterima pada sidang ke-30 Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia di Bandar Seri Begawan pada tanggal 4–6 Maret 1991.

c. EYD Edisi III (2009–2015)

Pada 31 Juli 2009, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) edisi III. Dengan demikian, EYD edisi II yang ditetapkan pada 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penyempurnaan terhadap EYD dengan mempertimbangkan adanya perkembangan kehidupan masyarakat. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

d. Perubahan dari EYD Edisi II ke EYD Edisi III

Ada beberapa perubahan dari EYD edisi II ke EYD edisi III (Depdiknas, 2000; Depdiknas, 2009). Perubahan tersebut sebagaimana dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Pada EYD edisi II hanya terdapat dua kolom huruf abjad, yakni kolom huruf dan nama huruf tersebut. Sementara itu, pada EYD edisi III terdapat tiga kolom, yaitu kolom huruf kapital, huruf kecil, dan nama huruf. Sebenarnya, dalam EYD edisi II sudah ada pembedaan penulisan huruf kapital dan kecil, tetapi tidak dipisahkan dalam kolom yang berbeda.
- 2) Pada EYD edisi III ada penambahan catatan pada **E. Gabungan Huruf Konsonan** “Nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus”.

- 3) Adanya penambahan pada EYD edisi III, yakni penambahan pada pemakaian huruf kapital “Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada *de*, *van*, dan *der* (dalam nama Belanda), *von* (dalam nama Jerman), atau *da* (dalam nama Portugal), misalnya, *J.J. de Hollander*, *J.P. van Bruggen*, *Otto von Bismarck*, dan *Vasco da Gama*”. Huruf kapital juga tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata *bin* atau *binti*. Misalnya, *Ahmad Bahiej bin Sholeh Muslim* dan *Ening Herniti binti Harun Tjiptodiharjo*.
- 4) Ada penambahan aturan pemakaian huruf kapital pada EYD edisi III, yakni huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas, seperti *dan*, *oleh*, *atau*, dan *untuk*. Misalnya, *Badan Kesehatan Ibu dan Anak*.
- 5) Adanya penambahan tentang pemakaian huruf kapital, yaitu “Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti *keterangan*, *catatan*, dan *misalnya* yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu”.
- 6) Pada EYD III terdapat aturan baru tentang pemakaian huruf kapital.

7. Ejaan Bahasa Indonesia (2015-sekarang)

Pembenahan terhadap Ejaan Bahasa Indonesia masih terus diupayakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia karena ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Adapun latar belakang pembaharuan ejaan bahasa Indonesia adalah kemajuan iptek, seni, beragama ranah pemakaian bahasa Indonesia, dan memantapkan

fungsi bahasa Indonesia. Di samping itu, adanya perubahan nama Ejaan yang Disempurnakan menjadi Ejaan Bahasa Indonesia karena adanya kritik atau tidak kepuasan masyarakat perihal nama Ejaan yang Disempurnakan. Nama *Ejaan yang Disempurnakan* mengimplikasikan bahwa ejaan bahasa Indonesia sudah sempurna sehingga tidak perlu diubah lagi. Namun, pada kenyatannya Ejaan yang Disempurnakan mengalami tiga kali perubahan, yakni EYD pada edisi pertama yang berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1987. Kemudian ada perubahan lagi pada EYD edisi kedua yang dari tahun 1987 sampai dengan 2009. EYD edisi ketiga berlaku dari tahun 2009 sampai dengan 2015.

Setelah 43 tahun, yakni dari 1972 sampai dengan 2015, terjadi perubahan ejaan lagi, yakni perubahan dari Ejaan yang Disempurnakan (EYD) menjadi Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Anis Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, EBI diresmikan pada tanggal 26 November 2015 di Jakarta. Pada tanggal 30 November 2015, EBI diundangkan di Jakarta dengan ditandatangani oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekajatjahjana. Berita acara salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Aris Soviyani (Kemendikbud, 2016: vi-vii).

Penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia termuat dalam Pasal 1 (1) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penmggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar; (2) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 30 November 2015. Ketetapan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekadjahjana.

E. PERUBAHAN DARI EYD KE EBI

Beberapa perubahan dari EYD dan EBI sebagaimana tertuang pada lampiran Permendiknas RI No. 46 Tahun 2009 (Pedoman Umum EYD) dan lampiran Permendikbud RI No. 50 Tahun 2015 (PUEBI). Adanya perubahan dari EYD dan EBI berupa 20 penambahan, 10 penghilangan, 4 pengubahan, dan 2 pemindahan (Karyati, 2016: 175-185).

1. Penambahan Klausul

Berikut perincian dua puluh penambahan klausul yang terdapat pada Ejaan Bahasa Indonesia.

- a. Penambahan informasi tentang pelafalan penggunaan diakritik *é* dan *è*.
- b. Penambahan keterangan bahwa huruf *x* pada posisi awal kata diucapkan [s].
- c. Penambahan diftong *ei*, misalnya, pada kata *survei*.
- d. Penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu yang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital, misalnya, *Jenderal Kancil* dan *Dewa Pedang*.
- e. Penambahan penjelasan unsur nama orang yang bermakna “anak dari”, seperti *bin*, *binti*, *boru*, dan *van*, tidak ditulis dengan huruf kapital.
- f. Penambahan cara pembedaan unsur nama geografi yang menjadi bagian nama diri dan nama jenis.
- g. Penambahan contoh gelar lokal, misalnya, *daeng*, *datuk*, dan *tubagus*.

- h. Penambahan penjelasan penulisan kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai penyapaan ditulis dengan huruf kapital, misalnya, “Hai, Kutu Buku, sedang menulis apa?”
- i. Penambahan catatan bahwa nama diri dalam bahasa daerah atau bahasa asing tidak perlu ditulis dengan huruf miring.
- j. Penambahan klausul bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis dengan huruf miring.
- k. Penambahan contoh bagian karangan yang ditulis dengan huruf tebal.
- l. Penambahan catatan bahwa imbuhan yang diserap dari unsur asing, seperti *-isme*, *-man*, *-wan*, atau *-wi*, ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya.
- m. Penambahan klausul, yaitu singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Selain itu juga, ditambahkan contoh dan catatan.
- n. Penambahan keterangan seperti partikel *pun* yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkaian dan dilengkapi pula dengan contoh pemakaiannya dalam kalimat.
- o. Penambahan klausul bahwa bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya, Kelapadua, Simpanglima, dan Tigaraksa.
- p. Penambahan klausul penggunaan tanda hubung antara (1) kata dengan kata ganti Tuhan, (2) huruf dan angka, dan (3) kata ganti dengan singkatan.
- q. Penambahan klausul bahwa tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata *pasca-* berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran *-isasi* pada kata *betonisasi* sebaiknya diubah menjadi *pembetonan*.
- r. Penambahan klausul, yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.
- s. Penambahan klausul bahwa tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain.

- t. Penambahan atau pendetailan banyak unsur serapan dari bahasa Arab.

2. Penghilangan

Berikut perincian sepuluh penghilangan klausul yang terdapat pada Ejaan Bahasa Indonesia.

- a. Penghilangan keterangan bahwa huruf *k* di sini melambangkan bunyi hamzah.
- b. Catatan pada bagian “Gabungan Huruf Konsonan” EYD yang menyatakan bahwa “Nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus” dihilangkan.
- c. Penghilangan klausul “Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata, seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu.
- d. Penghilangan bagian 3c, yaitu klausul “Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia.
- e. Penghilangan klausul bahwa bukan huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan,
- f. melainkan huruf miring.
- g. Penghilangan klausul penggunaan huruf tebal dalam kamus.
- h. Penghilangan bagian B.1.b, yaitu klausul “Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia.
- i. Penghilangan klausul “Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *pro*, *kontra*, dan *anti*, dapat digunakan sebagai bentuk dasar”.
- j. Penghilangan klausul “Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan.

- k. Penghilangan klausul “Kata ganti itu (-ku, -mu, dan -nya) dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital”.

3. Perubahan

Berikut perincian empat perubahan klausul yang terdapat pada Ejaan Bahasa Indonesia.

- a. Perubahan “bukan bahasa Indonesia” menjadi “dalam bahasa daerah atau bahasa asing” ditulis dengan huruf miring.
- b. Pada Bag II.F. terdapat perubahan judul. Jika pada EYD, judul pada bagian ini ialah “Kata Depan *di*, *ke*, dan *dari*”, pada PUEBI judulnya diubah menjadi “Kata Depan”
- c. Perubahan klausul bahwa tanda hubung (-) dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya, “*di-sowan-i*.”
- d. Perubahan klausul “Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan” menjadi “Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian”.

Dari beberapa perubahan di atas yang paling menonjol adalah adanya penambahan diftong *ei* pada EBI. Pemakaian diftong *ei* sudah ada sejak lama, misalnya, terdapat pada kata *survei* dan *geiser*. Namun keberadaan diftong tersebut baru ditetapkan pada sistem ejaan EBI. Hal ini menambang deretan diftong bahasa Indonesia, yakni diftong *ai*, *au*, *oi*, dan *ei*.

4. Pemindahan

Terdapat dua pemindahan, yakni 1) Pemindahan bagian B.2. yaitu klausul “Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya” ke bagian D.3. (Gabungan Kata); dan 2) Pemindahan bagian B.3., yaitu klausul “ Jika bentuk dasar yang

berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai” ke bagian D.4. (Gabungan Kata).

F. PENUTUP

Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami tujuh kali perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal pembaruan ejaan dalam bahasa Melayu (bahasa Indonesia). Sebelum kemerdekaan, berlaku ejaan yang bernama Ejaan van Ophuijsen yang resmi diakui pada tahun 1901. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ejaan, yakni Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi (1947–1956), Ejaan Pembaharuan (1956–1961), Ejaan Melindo (1961–1967), Ejaan Baru/Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) (1967–1972), Ejaan yang Disempurnakan (EYD) (1972–2015), dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) (2015 sampai sekarang). Meskipun telah mengalami tujuh kali perubahan, yang diberlakukan hanya empat, yakni Ejaan van Ophuijsen, Ejaan Soewandi, dan Ejaan Bahasa Indonesia. Sementara itu, tiga ejaan, yakni Ejaan Pembaharuan, Ejaan Melindo, dan Ejaan Baru/Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) tidak diberlakukan karena alasan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, ARTIKEL ILMIAH, DAN JURNAL

- Chaer, Abdul. 2002. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2000. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Depdiknas. 2009. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Depdiknas. 2009. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kemendikbud. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Sastra Indonesia. 2004. *Ensiklopedi Sastra Indonesia*. Bandung: Titian Ilmu.
- Herniti, Ening, Sriharini, dan Navilah Abdullah. 2005. *Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Karyati, Zetty, "Antara EYD dan PUEBI: Suatu Analisis Komparatif", jurnal *SAP* Vol. 1 No. 2 Desember 2016, hlm. 175-185, diunduh dari <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sap/article/view/1024>.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Kushartanti, Untung Yuwono, Multamia RMT Lauder. 2007. *Pesona Bahasa Indonesia: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muslich, Mansur dan I Gusti Ngurah Oka. 2010. *Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2014. *Kalimat Efektif*. Bandung: Refika Aditama.

- Samsuri. 1985. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya.
- Wahyudi, Isnaeni Praptanti, dan Bivit Anggoro Prasetyo Nugroho. 2017. *Bahasa Indonesia Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Winarto, Yunita T., Totok Suhardiyanto, dan Ezra M. Choesin. 2016. *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, dan Mencermatinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulyadi, Yadi. 2017. *Ejaan Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- van Ophuijsen, Ch. A. 1983. *Tata Bahasa Melayu*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

B. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diunduh 1 Juni 2018.